

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang di peroleh pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem Informasi Pelatihan Kerja digunakan untuk mendukung kegiatan pemagangan dan pengolahan pelatihan berbasis masyarakat.
2. Melalui sistem ini kepala seksi dapat mengevaluasi kinerja peserta magang dalam negeri pada setiap perusahaan dengan peserta magang dan perusahaan yang cukup banyak
3. Calon peserta magang melalui sistem ini memudahkan proses pendaftaran magang karena proses pendaftaran magang sudah bisa langsung dilakukan di dinas pemerintah kabupaten/kota, tidak harus di dinas provinsi
4. Dinas kab/kota lebih mudah dalam memasukan rekomendasi desa yang akan diberikan pelatihan berbasis masyarakat
5. Kepala seksi melalui sistem ini mendapatkan informasi berupa laporan kegiatan dari pemagangan dan pelatihan berbasis masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian ini, antara lain :

1. Sistem ini dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan *user* peserta magang sehingga peserta magang bisa menginput sendiri kinerja selama melakukan magang di perusahaan yang kemudian akan di validasi oleh pihak perusahaan.
2. Pada *user* perusahaan bisa ditambahkan form absensi peserta magang selama mengikuti magang di perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, D.F. 2010. *Sistem Informasi Pelatihan Dan Pemagangan Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung*. Skripsi. Bandung : Universitas Komputer Indonesia.
- Maulana, M.I. 2011. *Sistem Informasi Pelatihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Subang*. Skripsi. Bandung : Universitas Komputer Indonesia.
- Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor 11 Tahun 2013. Jakarta: Sekretariat Jendral Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor PER.22/MEN/IX/2009. Jakarta: Sekretariat Jendral Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor : PER.08/MEN/V/2008. Jakarta: Sekretariat Jendral Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sudharyana, P., Hidayanto, B.C., Muqtadiroh,F.A. 2012. Rancang Bangun Sistem Penilaian Index Kepuasan Pegawai Terhadap Lingkungan Kerja Melalui Dashboard Terintegrasi Dengan Menggunakan Metode Prototipe, Studi Kasus PT. PLN (PERSERO) Area Bali Selatan. *Jurnal Teknik Pomtis*, Vol. 1, No. 1, (2012) 1-6, diakses 2 November 2016.

Susilo, G. 2014. Sistem Informasi Tenaga Kerja Pada Disnakersostrans Kabupaten Magelang. *Jurnal Transformasi*, Vol. 10. No. 2, diakses 5 November 2016.